

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia yang kaya akan sumber daya hayati potensial menjadi peluang tersendiri sebagai daya tarik wisata. Bentang alam yang menyajikan keindahannya berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek ekowisata. Definisi ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Definisi ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Wood (1999:119) bahwa ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Definisi dari ekowisata kemudian berkembang menjadi ekowisata adalah suatu bentuk baru dari perjalanan yang bertanggung jawab atas area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Apabila melihat sedikitnya dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekowisata merupakan bentuk wisata konservatif yang dalam pengelolaannya dapat menciptakan industri pariwisata untuk kesejahteraan bersama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan ekowisata dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pariwisata konservasi.

Pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang dengan menggunakan perspektif *collaborative governance* melibatkan berbagai peran multi sektor. *Collaborative governance* merupakan lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar sektor pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan atau menerapkan kebijakan publik atas pengelolaan program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2008:544).

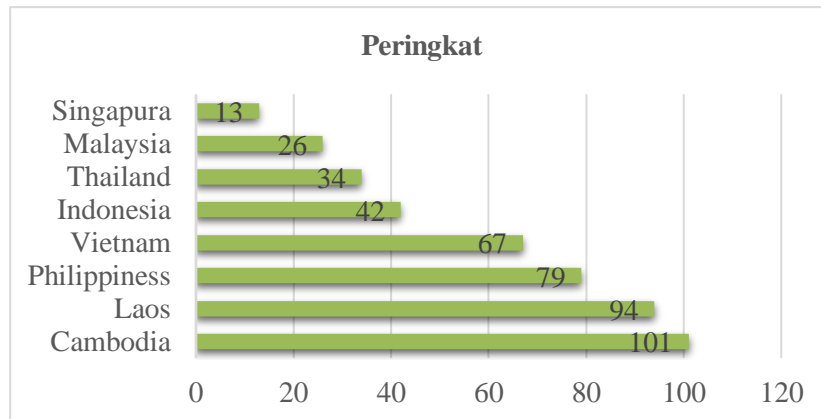
Hal pertama yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata perlu adanya proses identifikasi potensi yang ada di daerah bersangkutan. Suatu daerah wisata yang menarik setidaknya memiliki 5 (lima) syarat, yaitu sesuatu yang dapat dilihat, dilakukan, dibeli, dinikmati, dan berkesan (Suwena dan Widyatmaja, 2017:97).

Setelah mengidentifikasi potensi daerah yang akan dikembangkan suatu wisata, maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas 4 (empat) hal dalam pengelolaan pariwisata, yaitu perencanaan kawasan pariwisata, pembangunan fasilitas utama dan pendukung pariwisata, mengeluarkan kebijakan terkait pariwisata, serta penegakkan aturan terkait kepariwisataan. Selain tanggung jawab tersebut, peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, yaitu melakukan pembinaan atas standar kualitas produk yang dijual belikan, melakukan penataan dan konservasi lingkungan, melakukan perbaikan atau pengadaan infrastruktur pembuangan akhir, menyajikan informasi serta fasilitas kepariwisataan, melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan, dan melakukan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Proses pengelolaan ekowisata tidak hanya dititik beratkan kepada peran pemerintah, namun juga berbagai sektor yang dalam hal ini peran swasta, komunitas, hingga masyarakat turut andil. Sinergi peran *stakeholders* tersebut divisualisasikan dengan menggunakan perspektif *collaborative governance*.

Peran dan tanggung jawab yang dilakukan pemerintah baik di lingkup nasional maupun daerah jika disinergikan dengan peran *stakeholders*, maka dalam pengoptimalan pengelolaan pariwisata akan berjalan dengan baik serta memberikan *output* yang optimal. Peran antar aktor dalam pengelolaan pariwisata dinilai belum

maksimal dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-42 atas kegiatan pariwisata dan perjalanan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan grafik berikut ini.

Gambar 1.1 Peringkat Pariwisata dan Perjalanan Negara di Asia Tenggara



Sumber: *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017*

Sektor pariwisata tidak hanya menjadi sektor potensial yang dimiliki nasional yang dalam hal ini Indonesia, namun juga menjadi sektor unggulan di banyak daerah. Kabupaten Semarang memiliki sektor potensial di bidang industri, pertanian, dan pariwisata (Intanpari) berupaya dalam memaksimalkan potensinya untuk memajukan daerah tersebut. Pariwisata yang dalam hal ini menjadi fokus penelitian dalam menganalisis *collaborative governance* sebagai perspektif pengelolaan ekowisata. Kabupaten Semarang menjadi unggulan wisata Provinsi Jawa Tengah dengan semboyan pariwisata Kabupaten Semarang yaitu “Surganya Jawa Tengah”. Wisata yang disuguhkan berupa wisata alam, budaya, khusus, dan buatan.

Banyaknya wisata tidak hanya memberikan peluang, namun di sisi lain juga menjadi hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengoptimalkan

pengelolaan ekowisata yang begitu beragam. Peluang yang diberikan seperti dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat dengan wisatawan yang berkunjung, namun di balik hal tersebut terdapat hambatan berupa banyaknya lokasi wisata menjadi kurang optimal dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, sektor swasta, dan masyarakat setempat daerah wisata.

Pengelolaan yang telah dilakukan pemerintah memang terbukti belum optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disporapar tahun 2015, menunjukkan masih adanya hambatan dan tantangan, seperti kurangnya infrastruktur objek pariwisata, masih rendahnya kualitas produk wisata, promosi kepada wisatawan maupun investor belum dilakukan secara masif, belum optimalnya kinerja *stakeholders*, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih rendah, pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata belum optimal dilakukan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan belum dilakukan dengan baik, serta kuantitas SDM dengan daya saing tinggi yang masih terbatas. Perlu adanya strategi dan sinergi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata salah satunya dengan mengoptimalkan *collaborative governance*.

Kabupaten Semarang dengan wisata yang beragam akan begitu kompleks jika dianalisis dengan perspektif *collaborative governance*. Terdapat dua ekowisata yang akan menjadi peran utama dalam pembahasan nantinya. Menurut Yoeti (1997) dalam Irwan dan Towoliu (2021:16), berdasarkan objeknya ekowisata terbagi atas dua jenis, yakni ekowisata alam dengan karakteristik dapat dilihat dan dirasakan (pemandangan alam, flora, fauna, hutan), dan ekowisata budaya dengan

karakteristik adanya kebudayaan yang tidak hanya dapat dilihat atau disaksikan, melainkan juga dapat dipelajari.

Berdasarkan kategori yang menjadi bagian dari jenis ekowisata, maka peneliti menganalisis dua ekowisata, yaitu Candi Gedongsongo sebagai salah satu representasi ekowisata dengan daya tarik budaya dan Lereng Kelir sebagai salah satu representasi ekowisata dengan daya tarik alam. Alasan peneliti memilih kedua wisata tersebut karena selain menjadi wisata konservasi yang menjadi ciri khas ekowisata, namun juga atas daya tarik yang berbeda dikarenakan ekowisata tersebut tidak hanya santer didengar wisatawan, tetapi juga pola wisata dan karakteristik yang hampir sama sehingga dapat dijadikan perbandingan dalam bagaimana *stakeholders* mengelola ekowisata tersebut. Karakteristik yang dimaksud yaitu kedua ekowisata tersebut menyuguhkan pemandangan alam yang sama indahnya, berada di lingkup desa yang masyarakatnya berperan besar dalam pengelolaan wisata sehingga kontak sosial antara wisatawan dan masyarakat masih kental, dua destinasi wisata dengan budaya lokal yang beragam, serta dua ekowisata yang masih sangat potensial jika dieksplorasi.

Stakeholder yang turut berkolaborasi dalam pengelolaan Wisata Candi Gedongsongo, antara lain; Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian Candi Gedongsongo; Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berperan dalam melakukan promosi dan pengembangan kawasan wisata Candi Gedongsongo; serta Perum Perhutani yang bertanggung jawab dalam melestarikan kawasan hutan lindung di kawasan Candi Gedongsongo. Pengelolaannya yang jelas dengan

pembagian tugas, namun masih terdapat permasalahan yang dialami dalam pengelolaan Candi Gedongsongo. Permasalahan tersebut berupa pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas yang belum optimal karena kurangnya sinergi dan koordinasi antar *stakeholders* dalam melakukan sinkronisasi (Muhyi dan Prabowo, 2021:9).

Lereng Kelir yang menyuguhkan pemandangan Danau Rawa Pening, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, dan Gunung Merbabu. Keindahan panorama yang disuguhkan tidak mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung meskipun perjalanan yang memakan waktu dan fasilitas utama berupa jalan untuk mendaki belum dibangun dengan baik. Daerah pedesaan yang masih kental dengan budaya, potensi alam berupa kopi, dan kontak sosial antara masyarakat dengan pengunjung dapat dioptimalkan dalam peningkatan pengelolaan ekowisata.

Penggunaan *collaborative governance* menjadi konsep yang kompleks untuk digunakan dalam menganalisis pengelolaan ekowisata. Dalam proses penelitian terdapat banyak temuan terkait upaya dan strategi apa saja yang sudah serta akan dilakukan dalam pengelolaan yang termaktub dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Temuan lainnya juga bagaimana aktor dalam mengimplementasikan *collaborative governance* yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan tolak ukur variabel berupa wawancara dengan temuan di lapangan. Penelitian yang berfokus pada analisa *collaborative governance* digunakan untuk menjelaskan sinergi antar sektor dalam melakukan pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang.

Hal yang mendukung alasan dalam penelitian ini tidak hanya sebagai analisa peran dan sinergi yang telah bahkan akan dilakukan dalam pengoptimalan pengelolaan ekowisata. Terdapat suatu permasalahan lain yang dinilai peneliti sebagai permasalahan yang perlu diteliti karena tidak hanya mendapatkan temuan, namun juga dapat sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengelola sektor potensialnya berupa wisata konservatif di Kabupaten Semarang yang beragam baik alam maupun budayanya, masih kalah saing dengan wisata baru yang berupa daya tarik wisata buatan. Ekowisata sebagai wisata konservasi baik alam maupun budayanya masih belum dapat bersaing dengan daya tarik wisata buatan baik secara kualitas maupun kuantitas yang gencar dioptimalkan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal pengelolaan dan pengembangannya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah sedikit disinggung dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah berupa bagaimana implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini, yaitu dapat mendapatkan temuan dan dapat menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini meliputi manfaat teoritik dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian teoritik dalam penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan terkait implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang. Adapun manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi bahkan perbaikan implementasi *collaborative governance* bagi Pemerintah Kabupaten Semarang utamanya Dinas Pariwisata dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian yang didapatkan telah diberikan oleh peneliti kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang harapannya keluhan yang disampaikan oleh pengelola wisata dapat segera tersampaikan dan mendapatkan solusi terbaik.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar sektor pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan atau menerapkan kebijakan publik atas pengelolaan program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2008:544). *Collaborative governance* dapat juga diartikan sebagai jenis tata kelola yang dilakukan oleh aktor publik dan swasta yang bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda. Representasi kolaborasi juga dilakukan oleh semua *stakeholder* dengan kepentingan yang relevan. Pemangku kepentingan yang dimaksud tidak hanya berasal dari pemerintah, swasta, namun juga partisipasi masyarakat dan kelompok lainnya yang berkaitan.

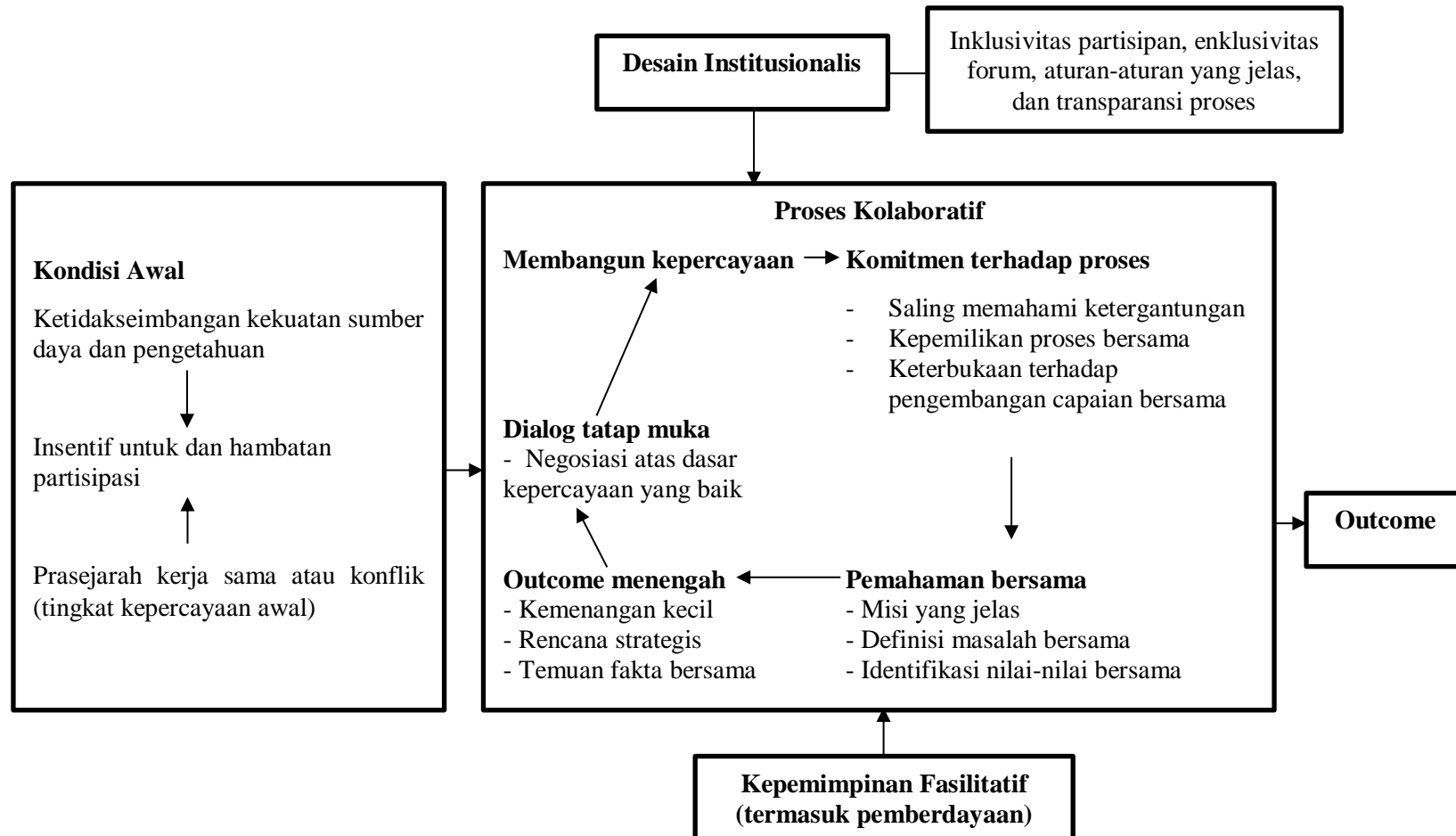
Stakeholder bersinergi dalam mengelola ekowisata Kabupaten Semarang antara lain: Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, BPCB Jawa Tengah, Perum Perhutani Jawa Tengah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BARENLITBANGDA) Kabupaten Semarang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, dan masyarakat setempat. Banyaknya *stakeholder* saling bersinergi dalam mengelola ekowisata memerlukan arah dan alur kerja dalam berkolaborasi.

Menurut Ansell and Gash (2008: 550 – 561) terdapat model *collaborative governance* sebagai representasi proses kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder*. Terdapat variabel-variabel yang harus diperhatikan sebelum proses kolaborasi diimplementasikan. *Pertama*, kondisi awal yang dialami oleh para *stakeholder*, seperti kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang tidak seimbang, misalnya: pengetahuan yang dimiliki komunitas pariwisata dengan masyarakat yang harus diseimbangkan dan masyarakat perlu melakukan koordinasi serta sinkronisasi dalam turut andil mengelola ekowisata sehingga dapat mengurangi hambatan. *Kedua*, kepemimpinan fasilitatif sebagai proses menyatukan *stakeholder* dan membagi peran serta tanggung jawab dalam menjalankan kolaborasi pengelolaan ekowisata, misalnya: sektor swasta berperan dalam membantu pemerintah sebagai penyedia fasilitas pendukung, sedangkan masyarakat berperan dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada di kawasan ekowisata. *Ketiga*, desain institusionalis dibentuk sebagai peraturan dan landasan dalam menjalankan kolaborasi.

Ketiga aspek tersebut yang mendasari proses kolaborasi berjalan dalam pengelolaan ekowisata. Proses kolaboratif yang terjadi juga masih memiliki siklus dimulai dari dialog tatap muka untuk membangun kepercayaan antar *stakeholder*. Kepercayaan yang telah terbentuk perlu adanya komitmen bersama dalam menjalankan proses kolaborasi berupa transparansi dan saling memahami tiap *stakeholder* memiliki peran yang sama pentingnya. Kesamaan pemahaman akan terbangun jika kepercayaan sudah terbentuk, menyamakan pemahaman diwujudkan dengan visi misi dalam mengelola ekowisata. Visi misi yang mulai dijalankan lalu menghasilkan *output* menengah yang ditemukan saat proses kolaborasi berlangsung, seperti menemukan rencana strategis baru yang diperlukan dalam melakukan proses pengelolaan ekowisata.

Tahap tersebut menjadi siklus yang divisualisasikan dengan anak panah yang dapat juga diartikan sebagai siklus yang bergerak dinamis di dalam proses kolaborasi hingga mencapai *outcome* yang optimal. Model tersebut yang dapat dijelaskan secara ringkas melalui gambar berikut ini.

Gambar 1.2 Model *Collaborative Governance* Ansell and Gash



Sumber: Ansell and Gash, 2008:550

Model kolaborasi yang dicetuskan oleh Ansell and Gash tidak hanya digambarkan melalui skema di atas namun juga dengan penjelasan proses kolaborasi yang dapat dikatakan sebagai siklus. Model kolaborasi dengan definisi masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut ini.

a. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Tahapan ini menjadi proses awal membangun relasi para aktor untuk berkolaborasi bersama mencapai tujuan. Hambatan yang menjadi masalah dalam tahap ini dapat berupa ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan yang tidak seimbang yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan antar aktor dan komitmen yang lemah.

b. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif menjadi unsur penting untuk menyatukan pemangku kepentingan dan membangun kerja sama sehingga antar aktor terlibat satu sama lain dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan diperuntukkan dalam membangun kepercayaan, memfasilitasi kegiatan dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama;

c. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Desain ini berfokus pada aturan dasar dalam proses kolaborasi. Aturan dasar yang jelas dan transparansi menjadi bagian penting dalam proses kolaborasi; dan

d. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses kolaborasi sebagai tahap eksekusi dalam menjalankan kegiatan dan tujuan yang hendak dicapai. Proses kolaborasi yang ditemukan yakni berupa siklus yang senantiasa berulang. Proses kolaborasi diawali dengan tahap dialog tatap muka yang bertujuan untuk menyamakan kesepahaman dan komitmen terhadap proses kolaborasi, membangun kepercayaan untuk mencapai kolaborasi aktif, komitmen untuk proses yang dioptimalkan dengan meningkatkan keterlibatan, pemahaman bersama yang dilakukan dengan menyamakan upaya dan strategi guna mencapai visi misi bersama, dan hasil antara yang sudah menggambarkan hasil dari proses kolaborasi dengan capaian yang selanjutnya dilakukan proses eksplorasi dan evaluasi.

1.5.2. Pengelolaan Ekowisata

Konsep ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Wood, 1999:119 bahwa ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekowisata yang dapat dikatakan sebagai wisata konservasi baik berupa alam, budaya, dan sejarah yang apabila dieksplorasi dengan optimal maka akan berdampak bagi masyarakat setempat dan dalam sektor wisata yang selalu menjadi sektor potensial tiap daerah. Wisatawan yang berkunjung ke ekowisata tidak hanya untuk berwisata namun juga

berupaya dalam melestarikan kawasan konservasi dan menambah pengetahuan.

Pengelolaan ekowisata adalah proses mengelola atau melakukan kegiatan merawat ekowisata dengan menggerakkan jasa, membantu perumusan kebijakan dan pengawasan pada kegiatan di dalam ekowisata. Kegiatan menggerakkan jasa dilakukan sesuai dengan sumber potensial yang dimiliki suatu destinasi wisata, misalnya: Candi Gedongsongo menggerakkan jasa berupa penyewaan kuda, sedangkan Lereng Kelir menggerakkan jasa berupa jasa ojek.

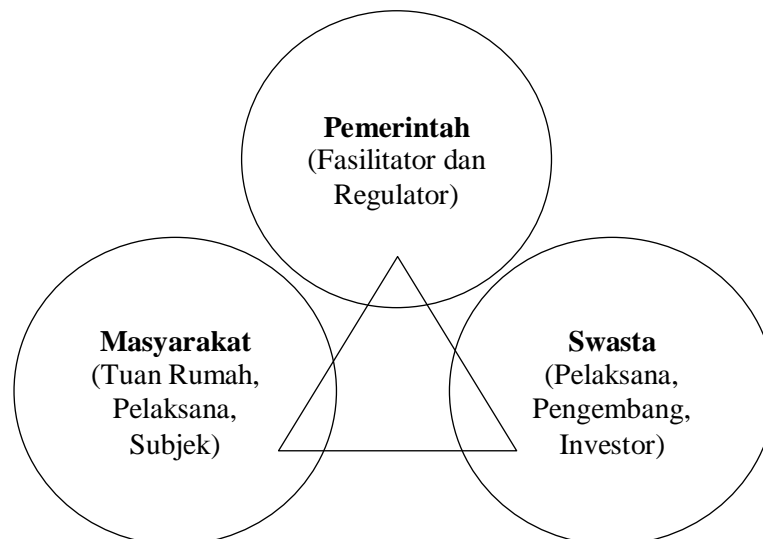
Menurut Soekmadi, dan Kartodihardjo (2010: 85) menjelaskan bahwa strategi pengelolaan ekowisata dirancang berdasar pada hasil analisa dari faktor penentu. Dalam menentukan faktor penentu tersebut, maka dilakukan analisa yang terdiri dari dua tahap, yaitu: *Pertama*, mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh dalam proses pengelolaan pariwisata yang dalam penelitian ini yaitu ekowisata; *Kedua*, menentukan faktor penentu dalam proses pengelolaan ekowisata berdasar pada hasil kajian dari badan dan studi literatur.

Terdapat faktor penentu yang mempengaruhi proses pengelolaan ekowisata, antara lain: Potensi Objek Daya Tarik Wisata; Kebijakan Pemerintah Daerah; Permintaan Ekowisata; Partisipasi Masyarakat; Sarana dan Prasarana; Keamanan; Penataan Ruang Wisata; Promosi dan Pemasaran; Kapasitas Kelembagaan; Manajemen Atraksi; Kerja Sama Antar Daerah; Kontribusi Ekonomi; dan Pendidikan Masyarakat. Setelah membagi faktor

penentu tersebut, maka dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam mengelola ekowisata.

Setelah penjelasan terkait faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan ekowisata, maka terdapat pula konsep aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Ilustrasi yang menjelaskan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata dapat ditunjukkan dengan gambar berikut ini.

Gambar 1.3 Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Objek Wisata



Sumber: Wearing and Donald 2001

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretif dalam menjawab masalah penelitian. Paradigma interpretif konstruktivis dan kritis akan berhasil jika banyak temuan saat proses pengamatan dan pihak yang terlibat dalam proses pengambilan data.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Dalam hal pengelolaan ekowisata melalui perspektif *collaborative governance*, maka ekowisata merupakan teori yang didefinisikan secara

konseptual, sedangkan pengelolaan ekowisata dengan perspektif *collaborative governance* merupakan konsep yang didefinisikan secara operasional. Ekowisata adalah kegiatan wisata ke kawasan alami atau konservasi yang tidak hanya untuk melestarikan lingkungan namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat maupun daerah perekonomian daerah tersebut.

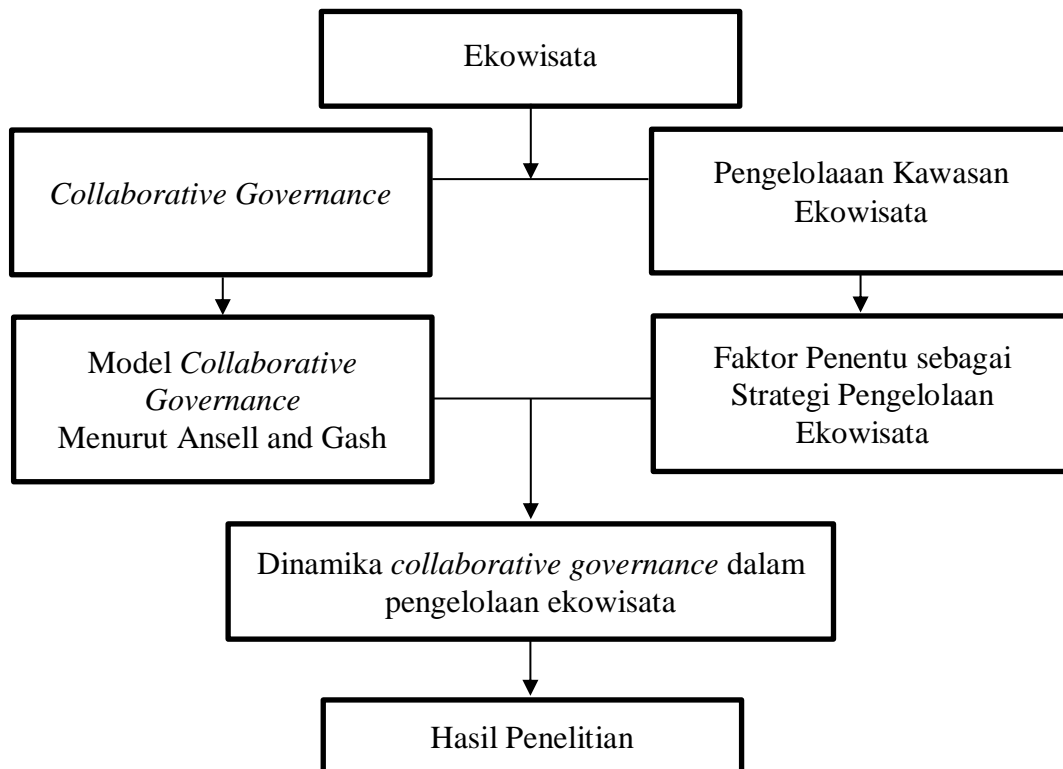
Pengelolaan ekowisata adalah proses mengelola atau proses melakukan kegiatan merawat ekowisata dengan menggerakkan jasa, membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pada kegiatan ekowisata. Seluruh peran tersebut dilakukan oleh berbagai *stakeholders* yang saling berkolaborasi yang disebut dengan *collaborative governance*.

Collaborative governance dapat diartikan sebagai sinergi dari berbagai *stakeholder* dalam melakukan kolaborasi yang di dalamnya memuat beberapa hal seperti pengambilan keputusan dan menerapkan kebijakan publik atas pengelolaan suatu program atau aset publik. *Collaborative governance* sebagai perspektif dalam pengelolaan ekowisata digunakan sebagai bentuk sinergi antar sektor dalam mengelola ekowisata. Proses pengelolaan ekowisata berjalan baik apabila dioptimalkan melalui model *collaborative governance*. Model tersebut digunakan peneliti dalam melihat kolaborasi yang dilakukan *stakeholder* dalam mengelola ekowisata pada dua lokus penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan kejadian atau tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan ekowisata atas kolaborasi para *stakeholder*, dengan pedoman yang dilandasi dari teori terkait ekowisata dan pengelolaan

ekowisata, konsep dan variabel. Berdasarkan konsep tersebut, dapat ditunjukkan dengan kerangka berpikir sebagai berikut.

Gambar 1.4 Kerangka Berpikir dalam Penelitian



Operasionalisasi konsep tersebut ditarik melalui satu gagasan utama yaitu ekowisata dengan menariknya berdasarkan penjelasan terkait peran *stakeholder* melalui *collaborative governance* sebagai perspektif dalam melihat pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang. Proses penelitian di lapangan berfokus pada variabel Model *Collaborative Governance*, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaborasi. Peneliti juga mengambil temuan yang dikomparasikan dengan rencana strategis dalam mengelola bahkan mengembangkan wisata berdasarkan faktor penentu yang nantinya digunakan sebagai bentuk strategi dalam pengelolaan ekowisata. Sinergi dari dua konsep

tersebut disinkronisasi dengan temuan dan menjadi bahan perbandingan dari dua lokus penelitian.

1.7. Argumen Penelitian

Dalam implementasi pengelolaan dan pengembangan ekowisata tentu akan mengalami fluktuasi baik secara kualitas pembangunan maupun kuantitas wisatawan. Ekowisata yang potensial sebagai salah satu sektor Intanpari yang dimiliki Kabupaten Semarang akan memberikan *output* yang maksimal jika dalam pengelolaannya terdapat proses *collaborative governance* yang baik. Selain proses kolaborasi yang harus berjalan sistematis, diperlukan juga strategi pengelolaan dan pengembangan wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Implementasi *collaborative governance* yang baik dapat berupa sinergi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dilakukan dengan terorganisir. Pemerintah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai promotor, regulator, dan fasilitator, didukung dengan sektor swasta yang berperan dalam kegiatan investasi, dan masyarakat yang dapat memanfaatkan peluang dalam mendapatkan pendapatan baik berupa menjual barang maupun jasa.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Peneliti dalam mencari jawaban permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap

masalah sosial atau manusia. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang mendeskripsikan peran tiap *stakeholder* yang berkolaborasi dalam mengelola ekowisata dan strategi yang dilakukan dalam mengelola hingga mengembangkan ekowisata pada Candi Gedongsongo dan Lereng Kelir.

Strategi penyelidikan yang dilakukan peneliti dalam mengeksplorasi secara mendalam terkait program, peristiwa, aktivitas, serta proses. Sebagai suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami, peneliti telah melakukan wawancara secara mendalam kepada informan kunci maupun informan lainnya guna mendapatkan akurasi data. Data diambil berupa kata atau teks yang kemudian dianalisis dan dikembangkan dengan interpretasi peneliti untuk menangkap arti yang lebih dalam. Data yang berbeda pada dua lokus penelitian kemudian menjadi bahan perbandingan terkait *collaborative governance* dan strategi pengelolaan yang diterapkan. Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan non positivis dengan peneliti memasukkan interpretasinya dalam penelitian.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mendapatkan data terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan *stakeholders* yang bekerja sama dalam implementasi *collaborative governance* pada Wisata Candi Gedongsongo dan Lereng Kelir yang kaitannya dengan pengelolaan ekowisata. Peneliti juga telah melakukan pengamatan pada kawasan ekowisata di Candi Gedongsongo sebagai salah

satu representasi daya tarik wisata budaya dan Lereng Kelir sebagai salah satu representasi daya tarik wisata alam sebagai salah satu analisa untuk sinkronisasi data primer dengan temuan di lapangan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian yang meliputi:

1. Triyanta, S.E. selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, pengambilan data bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, pada Senin, 13 Juni 2022.
2. Suyamto, S.E, M.Ak. selaku Kepala UTPD Pengelola Objek Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, pengambilan data bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang pada Rabu, 15 Juni 2022.
3. Musliman selaku Pengelola Objek Wisata Candi Gedongsongo, pengambilan data bertempat di Objek Wisata Candi Gedongsongo pada Jumat, 9 September 2022.
4. Ngatimin selaku Staf BPCB Jawa Tengah dan Koordinator BPCB Jawa Tengah pada Objek Wisata Candi Gedongsongo, pengambilan data bertempat di Gedung Operasional BPCB di Objek Wisata Candi Gedongsongo pada Sabtu, 10 September 2022.
5. Tri Kandung selaku Koordinator Perhutani pada Wisata Candi Gedongsongo, pengambilan data dilakukan secara daring pada Rabu, 5 Oktober 2022.

6. Sumarno selaku perwakilan masyarakat setempat kawasan wisata Candi Gedongsongo yang juga sebagai Anggota Paguyuban Jasa Kuda, pengambilan data bertempat di Objek Wisata Candi Gedongsongo pada Jumat, 9 September 2022.
7. Iman Syafroni selaku Pengelola Wisata Lereng Kelir, pengambilan data bertempat pada *Cafe Hillside* Lereng Kelir pada Sabtu, 10 September 2022.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan data berupa teks atau kata tertulis yang berasal dari wawancara yang dikembangkan dengan interpretasi peneliti untuk menjawab persoalan implementasi sinergi *stakeholders* sebagai perspektif *collaborative governance* dalam melakukan pengelolaan ekowisata dan strategi yang dilakukan dalam pengelolaan ekowisata pada Candi Gedongsongo dan Lereng Kelir. Data hasil wawancara didukung dengan temuan dalam proses pengamatan dan dokumentasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti serta dokumen fisik seperti Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data utama yang diambil oleh peneliti dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu data primer

(diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (diperoleh secara tidak langsung).

Peneliti dalam mengambil temuan berdasarkan data primer dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan yang dilakukan antara peneliti dengan 6 (enam) informan yang memiliki korelasi sebagai *stakeholder* yang mengelola ekowisata pada Candi Gedongsongo dan Lereng Kelir. Pertanyaan wawancara bersifat terbuka, sehingga peneliti dapat melakukan pertanyaan interaktif dan bertanya secara lebih mendalam terhadap informan dan pertanyaan yang diajukan juga berkembang. Data primer tersebut dikumpulkan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi *collaborative governance* sebagai perspektif pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang dan strategi yang dilakukan para *stakeholder* untuk melakukan pengelolaan pada dua lokus yang dipilih peneliti, yakni Candi Gedongsongo dan Wisata Lereng Kelir.

Data sekunder digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang diperoleh, antara lain: Catatan pada saat pengamatan di lapangan; Dokumentasi pada lokus penelitian, seperti peta kawasan candi, biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan jasa kuda, dan pos pengamanan; Buku yang berjudul Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata; Jurnal yang memiliki topik terkait *collaborative governance*, strategi pengelolaan pariwisata, dan ekowisata; Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang dan Peraturan

Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; dan Dokumen pendukung analisis temuan, seperti Nota Kesepakatan pengelolaan ekowisata Candi Gedongsongo, rekapitulasi data kunjungan dan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Pariwisata. Data sekunder tersebut dikumpulkan oleh peneliti dalam menjadi pedoman penelitian, temuan di lapangan, dan bahan analisa.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melakukan tiga (3) tahapan dalam pengumpulan data. Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observation*)

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang dilakukan peneliti saat pengambilan data dan magang di instansi tersebut. Peneliti juga melakukan pengamatan pada Wisata Candi Gedongsongo dan Lereng Kelir sebagai lokus penelitian. Peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui situasi, tindakan, dan sinkronisasi dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara kepada subjek penelitian;

2. Wawancara (*indepth interview*)

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada 7 (tujuh) subjek penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang Destinasi Dinas

Pariwisata Kabupaten Semarang, Kepala UPTD Objek Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pengelola Wisata Candi Gedongsongo, Pengelola Wisata Lereng Kelir, Koordinator BPCB Jawa Tengah pada Wisata Candi Gedongsongo, Koordinator Perum Perhutani pada Wisata Candi Gedongsongo, dan Anggota Paguyuban Jawa Kuda. Peneliti melakukan wawancara pada sektor terkait dalam mengelola ekowisata di dua lokus tersebut untuk menjawab kolaborasi yang dilakukan dalam proses pengelolaan dan mendapatkan temuan yang bervariasi. Maksud dari temuan yang bervariasi ialah apakah tiap subjek memiliki jawaban yang berbeda dengan dibuktikan dalam pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan keabsahan data; dan

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan proses dokumentasi untuk memperoleh data maupun informasi yang berupa dokumen maupun gambar pada saat pengamatan. Dokumen yang mendukung dalam temuan data, antara lain: Buku yang berkaitan dengan pariwisata; dan Dokumen seperti nota kesepakatan, Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021, dan laporan rekapitulasi jumlah kunjungan wisata di Daya Tarik Wisata Kabupaten Semarang. Gambar pada saat pengamatan yang digunakan sebagai bukti dilakukannya pengamatan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti dalam mengolah data penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, penyederhanaan, dan transformasi data dari catatan tertulis yang didapatkan peneliti di lapangan. Proses ini berlangsung selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Peneliti dalam melakukan reduksi data menerapkan konsep reduksi data itu sendiri. *Pertama*, pemilahan data dilakukan peneliti termasuk pada saat pengambilan data berlangsung, seperti subjek penelitian yang sekiranya melakukan pengulangan jawaban meskipun diberikan pertanyaan yang berbeda, sehingga peneliti melakukan pemilahan data untuk pertanyaan. Peneliti juga melakukan pemilahan saat menganalisis data temuan, seperti jawaban dari beberapa *stakeholder* memiliki kesamaan dalam hambatan dan tantangan, maka peneliti mengompilasikan data temuan yang sama. *Kedua*, penyederhanaan dilakukan penelitian peneliti dengan mengambil makna penting dan interpretasi peneliti supaya hasil temuan tidak bertele-tele. *Ketiga*, transformasi data dengan mengubah beberapa temuan data yang berbentuk dialog menjadi tabel singkat supaya hasil temuan dapat lebih dipahami oleh pembaca;

2. Penyajian data

Penyajian data yang baik membuat penelitian kualitatif semakin valid dengan ditampilkannya gambar dan tabel. Jenis penyajian data tersebut disusun, digabung, dibandingkan, dan dianalisis untuk menjadi temuan yang tersusun dalam bentuk yang padu dan sebagai bukti dari pernyataan yang membangun adanya gambar dan tabel. Gambar yang ditampilkan peneliti dalam karya tulis ini, yaitu peringkat pariwisata dan perjalanan negara di Asia Tenggara, model *collaborative governance* menurut Ansell & Gash, pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, kerangka berpikir dalam penelitian, struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata Candi Gedongsongo, dan pemangku kepentingan pengelolaan dan pengembangan ekowisata Lereng Kelir. Tabel yang ditampilkan peneliti dalam karya tulis ini yakni, DTW Kabupaten Semarang tahun 2020, pertumbuhan wisatawan Kabupaten Semarang tahun 2016 – 2020, dan rekapitulasi data kunjungan wisata di DTW Kabupaten Semarang; dan

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan juga melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung ditambah dengan pemikiran peneliti selama melakukan tinjauan ulang pada catatan di lapangan. Hasil penelitian juga diberikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten

Semarang sebagai bentuk temuan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti di luar sektor yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan wisata, sehingga pimpinan instansi mendapatkan pandangan data lapangan dari pihak di luar instansi tersebut.

1.8.8. Kualitas Data

Peneliti dalam menganalisis data untuk ditampilkan pada hasil dan temuan menggunakan metode triangulasi dalam memastikan keabsahan data. Metode triangulasi terdiri atas tiga jenis, antara lain: *Pertama*, triangulasi sumber yang didapatkan dari informan kunci yang berasal dari Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pengelola Wisata Candi Gedongsongo, dan Pengelola Wisata Lereng Kelir, sedangkan data yang didapatkan dari informan berasal dari Kepala UPTD Objek Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Koordinator Perhutani pada Wisata Candi Gedongsongo, Koordinator BPCB pada Wisata Lereng Kelir, dan Anggota Paguyuban Jasa Kuda; *Kedua*, triangulasi metode dalam teknik pengumpulan data supaya dapat memastikan data wawancara memiliki sinkronisasi dengan temuan langsung di lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil data dari berbagai *stakeholder* yang berwenang dalam menjawab pertanyaan penelitian dan dari hasil wawancara tersebut dilakukan pengamatan langsung di lapangan apakah sesuai dengan hasil wawancara. Contoh peneliti dalam melakukan tahap ini, seperti data temuan pada proses wawancara menyebutkan sudah adanya aspek keamanan dalam strategi pengelolaan wisata, peneliti melakukan pengamatan pada wisata Candi Gedongsongo dan

menemukan adanya pos pengamanan hanya saja tidak ada staf yang menjaga pos tersebut; *Ketiga*, triangulasi data yang dilakukan dengan menanyakan kembali kepada informan untuk memastikan kredibilitas data. Peneliti tidak hanya menanyakan kembali pada subjek lainnya untuk mendapatkan data yang sinkron, namun juga memberikan data temuan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai bahan laporan temuan data yang berasal dari pihak di luar instansi tersebut.